

**Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus,
dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Ika Septia Wardani
Nomor Mahasiswa : 20313186
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA
2024**

**Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus,
dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ika Septia Wardani
Nomor Mahasiswa : 20313186
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Penulis,



Ika Septia Wardani

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus,
dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua**

Nama : Ika Septia Wardani
Nomor Mahasiswa : 20313186
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 4 September 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



Dr. Sahabudin Shidiq, M.A

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.

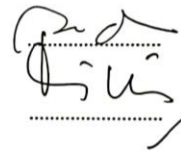
Disusun oleh : IKA SEPTIA WARDANI

Nomor Mahasiswa : 20313186

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 14 Agustus 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dr. Sahabudin Sidiq, M. A.

Penguji : Dra. Diana Wijayanti, M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

MOTTO



“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha. Selalu ada hikmah bagi mereka yang selalu bersabar”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang dinanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir, Aamiin. Dari lubuk hati yang dalam, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah memberikan pengalaman, motivasi, inspirasi, ilmu pengetahuan, serta wawasannya. Penelitian skripsi ini sebagai wujud penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih dari penulis yang dipersembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta Bapak Sudarman dan Ibu Waryati yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, serta kasih sayang untuk penulis selama ini, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan.
2. Adik tersayang Azis Dwi Sasongko yang terus memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bisa memberikan manfaat yang baik sebagai bentuk referensi dan rujukan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua” dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga skripsi ini dapat selesai. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang dinanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Skripsi ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menjadi salah satu kebahagiaan penulis dapat dalam menyelesaikan penelitian ini dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan dan perolehan gelar Sarjana strata satu (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dapat disebabkan karena adanya keterbatasan penulis dan faktor lain, sehingga masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta bagi penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan hormat rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., M.A. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, Ma.zec., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang bermanfaat serta memberikan dukungan dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis.
7. Seluruh karyawan *staff* tata usaha Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai Bapak Sudarman dan Ibu Waryati yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, serta kasih sayang untuk peneliti selama ini, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan.
9. Adik tersayang Azis Dwi Sasongko yang terus memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Farida Nur Aini, Alfinda Agsatie Rahmayanti, Nabila Ariini Rosyada, Oktaria Dwi Nur'aini, dan Salma Kholida Nouvajriya yang senantiasa mendukung, menghibur, serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman – teman Ilmu Ekonomi Angkatan 2020, teman seperjuangan yang telah banyak membantu, berbagi ilmu, memberikan dukungan kepada penulis dalam kegiatan selama perkuliahan.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung penulis. Penulis berdoa dan berharap agar semua pihak diberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang ada oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Ika Septia Wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PENGESAHAN UJIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.2 Landasan Teori.....	11
2.3 Hubungan Antar Variabel	20
2.4 Kerangka Penelitian	24
2.5 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Data Penelitian dan Sumber Data	25
3.2 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian	25
3.3 Metode Analisis	26
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Deskripsi Data Penelitian	30
4.2 Statistik Deskriptif.....	30

4.3 Hasil dan Analisis.....	31
4.3.1 Estimasi Regresi Data Panel.....	31
4.3.2 Pemilihan Model	31
4.3.3 Estimasi Model Regresi <i>Fixed Effect</i>	34
4.3.4 Uji Hipotesis.....	35
4.3.5 Analisis <i>Cross Section Effect</i>	37
4.4 Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Implikasi	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua	4
Tabel 2.1 Standarisasi Komponen IPM.....	14
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif	30
Tabel 4.2 Common Effect	31
Tabel 4.3 Fixed Effect	32
Tabel 4.4 Random Effect	32
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	33
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	33
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Fixed Effect	34
Tabel 4.8 Cross Section Effect	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar IPM di Indonesia tahun 2019 – 2023.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Tabel Data Penelitian	49
Lampiran II Statistika Deskriptif.....	53
Lampiran III <i>Common Effect</i>	54
Lampiran IV <i>Fixed Effect</i>	55
Lampiran V <i>Random Effect</i>	56
Lampiran VI Hasil Uji <i>Chow</i>	57
Lampiran VII Hasil Uji <i>Hausman</i>	58
Lampiran VIII <i>Cross Section Fixed Effect</i>	59

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dalam kurun waktu 2019 – 2023 dengan menggunakan bantuan Eviews 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Otonomi Khusus berpengaruh secara positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun, pada variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Desa berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan, pada variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci : *Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Autonomy Fund, and Village Fund on the Human Development Index. The data used in this research are secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The data analysis employed in this study is panel data regression over the period from 2019 to 2023, using Eviews 10 software.

The results indicate that the Special Autonomy Fund variable has a significant positive effect on the Human Development Index. However, the General Allocation Fund and Village Fund variables significantly negatively affect the Human Development Index. Meanwhile, the Revenue Sharing Fund variable shows no significant effect on the Human Development Index.

Keywords: Human Development Index, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Autonomy Fund, Village Fund.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya terpenting dan menjadi modal dasar dalam pembangunan suatu negara adalah manusia. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan memungkinkan rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya, serta kesehatan menjadi aspek yang mempengaruhi dalam proses pembangunan manusia. Pemerintah selalu mengedepankan pembangunan manusia dalam perencanaan programnya. Dalam hal tersebut, pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai proses pilihan bagi untuk berumur panjang, sehat jasmani rohani, berilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi, serta pilihan untuk memiliki kehidupan yang layak.

Untuk memiliki kehidupan sehat dan berumur panjang dapat diukur dari kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menilai hidupnya. Manusia yang menjalani kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal – hal tersebut sangat penting dalam pembangunan manusia tidak hanya dalam kesejahteraan saja melainkan adanya peningkatan kebutuhan dasar terhadap kesehatan, pendidikan, pengeluaran untuk kehidupannya serta perekonomian wilayah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat.

Pengukuran pembangunan manusia yang digunakan untuk melihat sejauh mana kesuksesan pembangunan suatu negara dalam menjamin kualitas hidupnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP atau *United Nation Development Programe* pada tahun 1990. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk menentukan pilihan dalam membangun hidupnya yang dianggap berharga. Indeks Pembangunan Manusia dapat dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu kesehatan yang dapat mengukur rata – rata harapan hidup, pendidikan yang dicapai, serta faktor ekonomi yang dapat menjadi standar kehidupan. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Nilai IPM yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil dalam pembangunan perekonomian.

Pembangunan manusia yang baik yaitu ketika angkanya mendekati 100, sedangkan angka yang mendekati nol berarti daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk. Terdapat kategori untuk menentukan tinggi atau rendahnya IPM suatu daerah, yaitu Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$, Tinggi : $70 \leq IPM < 80$, Sedang : $60 \leq IPM < 70$, Rendah : $IPM < 60$ (Badan Pusat Statistik, 2023). Besaran nilai IPM di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2019 IPM Indonesia sebesar 71,92 persen kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 74,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IPM di Indonesia termasuk tinggi, sehingga adanya peningkatan ini menandakan bahwa penduduk Indonesia mengalami peningkatan dalam kesejahteraan.

Gambar 1.1 Gambar IPM di Indonesia tahun 2019 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Selain ketiga unsur tersebut, IPM juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti tersedianya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, maupun kebijakan pemerintah. Dalam hal tersebut, untuk meningkatkan pembangunan manusia disertai dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan yang merata dapat menjadi jaminan bahwa masyarakat menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan pembangunan yang sudah dilakukan di berbagai negara, dapat diketahui bahwa terdapat dua hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan manusia, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai (Marhaeni et al., 2008). Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan dasar masyarakat karena alokasi

belanja publik berperan penting dalam peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan ini juga berdampak terhadap meningkatnya kualitas hidup manusia.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban di tiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah dapat meningkatkan pembangunan yang lebih berhasil sehingga dihipotesiskan pembangunan manusia juga dapat meningkat.

Dalam mewujudkan pembangunan suatu wilayah diperlukan biaya yang didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terdapat tiga struktur didalam APBD yaitu sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan sisi pembiayaan. Dalam sisi penerimaan APBD terdapat sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. APBD yang tersusun dari penerimaan daerah dan belanja daerah ini dapat mendorong pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat.

Dana Transfer Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang dialokasikan ke daerah – daerah otonom untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dana ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi wewenang pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berperan penting dalam kemajuan pembangunan daerahnya.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian paling timur Indonesia, berbatasan dengan Provinsi Papua Barat dan Samudra Pasifik. Provinsi Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan publik yang rendah dan kesejahteraan manusia yang rendah sehingga dampaknya dibuktikan dari nilai IPM Papua yang lebih rendah dari rata – rata nasional.

Pada tahun 2019, nilai IPM Papua sebesar 69,98 persen sedangkan rata – rata nasional IPM Indonesia adalah 71,92 persen. Bahkan hingga tahun 2023, Provinsi

Papua belum bisa menaikkan nilai IPMnya hingga mencapai nilai IPM rata – rata nasional yang sebesar 74,32 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Papua menjadi provinsi yang tertinggal dibandingkan provinsi yang lain. Meskipun demikian, Kabupaten Puncak Jaya (75,91) dan Kabupaten Deiyai (81,14) memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan nilai rata – rata IPM nasional. Berikut data perbandingan nilai IPM di Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota :

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua

No.	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Papua	69.98	70.09	70.49	71.24	72.19
2	Kabupaten Merauke	57.79	58.03	58.67	59.60	60.50
3	Kabupaten Jayawijaya	71.84	71.69	72.03	72.67	73.50
4	Kabupaten Jayapura	68.53	68.83	69.15	69.91	70.84
5	Kabupaten Nabire	67.76	67.66	67.72	68.41	69.11
6	Kabupaten Kepulauan Yapen	72.57	72.19	72.33	72.85	73.46
7	Kabupaten Biak Numfor	56.58	56.31	56.70	57.14	57.91
8	Kabupaten Paniai	48.33	48.37	48.99	49.84	50.81
9	Kabupaten Puncak Jaya	74.13	74.19	74.48	75.08	75.91
10	Kabupaten Mimika	61.51	61.53	61.62	62.52	63.46
11	Kabupaten Boven Digoel	58.30	58.15	58.70	59.61	60.57
12	Kabupaten Mappi	50.37	50.55	51.29	52.22	53.19
13	Kabupaten Asmat	49.25	49.37	49.48	50.25	51.19
14	Kabupaten Yahukimo	45.21	45.44	46.28	47.21	48.18
15	Kabupaten Pegunungan Bintang	49.68	49.50	49.60	50.51	51.48
16	Kabupaten Tolikara	63.45	63.63	63.94	64.86	65.80
17	Kabupaten Sarmi	66.59	66.40	66.49	67.24	68.08
18	Kabupaten Keerom	65.34	64.94	65.10	65.67	66.46
19	Kabupaten Waropen	62.30	62.30	62.72	63.65	64.61
20	Kabupaten Supiori	52.20	51.78	52.18	53.10	54.08
21	Kabupaten Mamberamo Raya	30.75	31.55	32.84	34.10	35.19
22	Kabupaten Nduga	48.00	47.86	48.68	49.62	50.56
23	Kabupaten Lanny Jaya	47.23	47.57	48.32	49.25	50.22
24	Kabupaten Mamberamo Tengah	48.08	48.34	49.01	49.90	50.87
25	Kabupaten Yalimo	42.70	43.04	43.17	43.87	44.59
26	Kabupaten Puncak	55.41	54.84	55.00	55.72	56.70
27	Kabupaten Dogiyai	47.51	47.79	48.34	49.25	50.19
28	Kabupaten Intan Jaya	50.11	49.46	49.96	50.42	51.18
29	Kabupaten Deiyai	80.16	79.94	80.11	80.61	81.14

30	Kota Jayapura	69.98	70.09	70.49	71.24	72.19
----	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Badan Pusat Statistik Papua

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa kondisi Papua saat ini sangat memprihatinkan. Rata – rata masyarakat di Papua belum mencapai tingkat kesejahteraan yang baik dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampaknya, permasalahan kemiskinan semakin sulit untuk diselesaikan dan terjadinya ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat berupaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi dengan memberikan pengalokasian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mendanai kebutuhan wilayahnya agar proses pembangunan dapat berjalan. Jika pengalokasian dana sesuai dengan sasaran maka segala pembangunan yang sedang direncanakan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia yang mencerminkan tingkat kesejahteraan.

Dalam UU HKPD, Undang – Undang Nomor 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa APBN mengalokasikan Dana Alokasi Umum atau DAU untuk mendanai keperluan daerah otonom serta pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka mencapai standar kelayakan layanan minimal. Adanya DAU diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan keuangan antar daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Dana lain yang dialokasikan ke tiap – tiap daerah yang bersumber dari APBN yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dan mengurangi ketimpangan. Pengalokasian dana yang tepat sasaran dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dana Otonomi Khusus atau yang lebih dikenal dengan nama dana otsus merupakan kebijakan berupa pemberian dana untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua mendapatkan dana otsus sebagai bentuk upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan dukungan khusus dalam pembangunan daerah tersebut. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Selain dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat, Provinsi Papua juga mendapatkan dana desa sebagai upaya untuk menanggulangi ketimpangan yang terjadi di desa – desa dalam daerah tersebut. Adanya dana desa sebagai modal pembangunan diharapkan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Meningkatnya pembangunan di desa ini dapat berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Semua dana – dana yang diberikan pemerintah dengan jumlah yang cukup besar untuk membantu membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat naik. Jika dana – dana tersebut dialokasikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur maka nilai IPM juga dapat meningkat.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar pengaruh dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Papua. Variabel IPM dipilih karena IPM menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan manusia dan berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa. Sumber daya manusia sebagai modal awal dan yang utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti memberikan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, penyelenggaraan program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan, menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang harapan hidup, dan sebagainya. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia.

Terjadinya ketimpangan antar daerah menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai IPM yang masih dibawah rata – rata IPM nasional. Untuk itu, diperlukan pembangunan yang berkelanjutan sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan yang dapat dilakukan meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk memudahkan akses perekonomian, kemudahan dalam menempuh pendidikan, kesehatan yang baik untuk mencapai taraf hidup sehat, serta peningkatan dalam pelayanan publik. Provinsi Papua dipilih sebagai objek penelitian karena dari tahun ke tahun nilai IPM-nya mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya dari tahun –

tahun sebelumnya kesejahteraan masyarakatnya mengalami peningkatan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua ?
3. Apakah dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua ?
4. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua ?
5. Apakah dana desa berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
2. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
3. Menganalisis pengaruh dana otonomi khusus bruto terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
4. Menganalisis pengaruh dana desa terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
5. Secara simultan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan terkait penulisan karya ilmiah serta wawasan yang mendalam terkait kondisi indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan IPM tiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
3. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengembangkan IPM, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya IPM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam mengembangkan IPM di kabupaten/kota di Provinsi Papua.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori yang secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Adapun model sistematika penelitian yang digunakan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan tentang teori – teori pendukung mengenai masalah yang dibahas yang terangkum dalam kajian pustaka dan landasan teori.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan disajikan hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan dari masalah yang dipaparkan.

Bab V : Simpulan

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran – saran dari penulis sebagai sumbangan penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian tentang indeks pembangunan manusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian sebelumnya dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin & Susilo (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan gabungan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel untuk diteliti dengan rentang waktu 2011-2020. Hasil dari penelitian ini adalah dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan secara tidak langsung variabel yang berpengaruh yaitu dana alokasi khusus dan penyesuaian, serta dana alokasi umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Aniek Juliarini dan Agung Widi Hatmoko (2020) dengan judul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Tanah Papua”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana otsus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berpengaruh positif terhadap IPM. Penambahan dana otsus dapat meningkatkan IPM namun, peningkatannya sangat kecil. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi geografi, sosiologi, geografi, atau dari kebijakan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Boky, 2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muhtarulloh, 2021) dengan judul “Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Terhadap IPM”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM di Papua dan Papua Barat. Pada IPM Papua periode 2002-2010 terjadi peningkatan dengan persentase 1,11 persen menjadi 1,05 persen pada periode 2010-2020. Sedangkan Papua Barat sebesar 1,38 persen menjadi 0,89 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhyanto dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat”. Hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pada penelitian dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rimawan & Aryani (2019) dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima”. Hasil dari analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia sedangkan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2022) dengan judul “Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Hasil dari otonomi daerah telah terlihat hasilnya ditandai dengan daerah-daerah di Indonesia gencar melakukan pembangunan dan menjaga adanya kesenjangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam kesenjangan fiskal, sehingga DBH yang dialokasikan dapat menjaga keseimbangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai ukuran pencapaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (BPS, 2023). Sedangkan menurut Todaro (2011) IPM dapat diartikan sebagai indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosioekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan.

IPM dapat ditentukan melalui pilihan seseorang yang dapat berupa berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan memperoleh

kehidupan yang layak. Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat, dan tingkat pengeluaran perkapita untuk mencapai standar hidup yang layak. Angka dari IPM ini berkisar dari 0 – 100 atau 0 – 1. Jika nilai IPM suatu wilayah semakin mendekati angka 100, maka semakin dekat untuk mencapai sasaran tersebut. Rumus untuk menghitung IPM adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)$$

Keterangan :

Indeks X1 = Indeks Kesehatan

Indeks X2 = Indeks Pendidikan

Indeks X3 = Indeks Ekonomi

Konsep pembangunan manusia merupakan salah satu konsep yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Peningkatan kualitas hidup yang dimaksud berupa fisik, mental, maupun spiritual. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat membuka peluang bagi penduduk untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan seperti dalam peningkatan kesempatan kerja.

Faktor pendidikan, keterampilan, dan pengalaman dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas seseorang. Adanya pembentukan modal ini dapat menjadi investasi modal bagi manusia. Investasi modal yang dapat disebut sebagai *human capital* dalam penerapannya dilakukan melalui pendidikan yang dicapai, kesehatan, dan pengalaman serta keterampilan seseorang. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Sumarsono, 2009).

2.2.1.1 Indeks Kesehatan

Menurut Badan Pusat Statistik, dalam mengukur tingkat kesejahteraan manusia melalui dimensi kesehatan, dapat diwakilkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup merupakan rata – rata perkiraan seseorang untuk hidup yang diukur dari waktu lahir. Data yang digunakan untuk pengukuran angka harapan hidup adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Angka harapan hidup didapatkan dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum dari harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP. Batas yang digunakan untuk perhitungan indeks yaitu 20 tahun untuk angka terendah dan 85 tahun untuk angka tertinggi. Semakin tinggi tingkat kesehatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang dalam berproduktivitas (Santoso, 2012). Produktivitas ini ditandai dengan giatnya dalam bekerja yang dapat menghasilkan upah sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan seseorang. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan dalam IPM yaitu :

$$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

2.2.1.2 Indeks Pendidikan

Menurut Badan Pusat Statistik, dalam mengukur tingkat kesejahteraan manusia melalui indeks pendidikan dapat diwakilkan oleh rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata – rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal yang ditempuh oleh seseorang. Rata – rata lama sekolah didapatkan dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum sesuai dengan standar UNDP. Batas yang digunakan untuk perhitungan indeks yaitu 0 tahun untuk batas minimumnya dan 15 tahun untuk batas maksimumnya.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah seberapa lama pendidikan yang dapat ditempuh oleh seseorang di masa mendatang. Batas usia untuk menghitung harapan lama sekolah yaitu 7 tahun ke atas. Pendidikan yang tinggi dapat menjadi *human capital* dalam mencari pekerjaan. Harapannya dengan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang (Santoso, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan dalam IPM yaitu :

$$I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

$$I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I \text{ Pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$

2.2.1.3 Indeks Ekonomi atau Standar Hidup Layak

UNDP dalam mengukur tingkat kesejahteraan manusia melalui indeks ekonomi dapat diwakilkan oleh produk domestik bruto (PDB) riil yang disesuaikan sedangkan BPS menggunakan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Indeks ini digunakan untuk mengukur standar hidup layak seseorang. Semakin membaik keadaan ekonomi suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga akan semakin membaik. Rumus untuk menghitung standar hidup layak dalam IPM yaitu :

$$I \text{ Pengeluaran Perkapita} = \frac{\text{Pengeluaran} - \text{Pengeluaran min}}{\text{Pengeluaran maks} - \text{Pengeluaran min}}$$

Tabel 2.1 Standarisasi Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup	tahun	20	85
Rata – Rata Lama Sekolah	tahun	0	18
Harapan Lama Sekolah	tahun	0	15
Pengeluaran Perkapita	rupiah	1,007,436	26,577,352

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Terdapat kategori untuk menentukan tinggi atau rendahnya IPM suatu daerah, yaitu Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$, Tinggi : $70 \leq IPM < 80$, Sedang : $60 \leq IPM < 70$, Rendah : $IPM < 60$ (Booklet, 2015).

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dalam UU HKPD, Undang – Undang Nomor 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa APBN mengalokasikan Dana Alokasi Umum atau DAU untuk mendanai keperluan daerah otonom serta pemerataan keuangan antar daerah untuk mencapai standar kelayakan layanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum berperan untuk menutup celah fiskal serta potensi ekonomi daerah tersebut. Besaran dana alokasi umum yang dialokasikan ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri atau PDN yang sudah ditetapkan oleh APBN.

Perhitungan dana alokasi umum dilakukan dengan menggunakan formula pendekatan celah fiskal dan Alokasi Dasar atau AD. Formulanya yaitu celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan Alokasi Dasar dapat berupa jumlah gaji PNS di daerah tersebut.

Formula dana alokasi umum :

$$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

$$CF = K_{bF} - K_{pF}$$

Keterangan :

1. AD = Alokasi Dasar

AD dihitung dari jumlah gaji PNS Daerah tahun sebelumnya, meliputi gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga.

2. CF = Celah Fiskal

CF ditentukan dari kebutuhan fiskal (K_{bf}) dikurangi kapasitas fiskal (K_{pf}). Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar. Kebutuhan ini diukur dari perkalian masing – masing bobot variabel dengan indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks produk domestik regional bruto atau pdrb perkapita. Sedangkan kapasitas fiskal merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah atau PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Mudrajat, 2014)

2.2.3 Dana Bagi Hasil

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dana bagi hasil dapat didefinisikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana ini yaitu untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (PP, 2023), menyatakan bahwa dana

bagi hasil dialokasikan per Daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan berikut, 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah Penghasil dan 10% berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Kementerian Keuangan (2017) menyatakan bahwa DBH pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip yaitu :

1. Prinsip *By origin*, yaitu prinsip penyaluran berdasarkan daerah penghasil. DBH pajak disalurkan lebih besar kepada daerah penghasil pajak dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah non penghasil mendapatkan DBH pajak sebagian saja.
2. Prinsip *based on actual revenue*, yaitu prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Realisasi penerimaan negara berasal dari pajak dalam tahun anggaran berjalan.

DBH pajak meliputi :

1. Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, seperti PBB pertambangan, PBB perkebunan, dan PBB perhutanan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan lain.
3. Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND), yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara terutang.
4. Cukai Hasil Tembakau, yaitu pajak yang dikenakan kepada daerah penghasil tembakau.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH sumber daya alam merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. DBH sumber daya alam disalurkan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH sumber daya alam terdiri dari

DBH sumber daya alam kehutanan, pertambangan mineral dan batu bara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi (Siregar, 2017).

2.2.4 Dana Otonomi Khusus

Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang mendapat otonomi khusus dari pemerintah pusat yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini didasarkan pada sumber daya manusia di daerah tersebut masih rendah sehingga dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya belum bisa dikelola dengan baik dan optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang cukup besar antara Provinsi Papua dengan daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Provinsi Papua mencapai standar hidup seperti di daerah lain.

Dana Otonomi Khusus atau yang lebih dikenal dengan nama dana otsus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam persentase tertentu dan jangka waktu tertentu. Dana otsus Papua ditentukan setara 2% dari dana alokasi umum nasional yang berlaku. Otonomi khusus ini termasuk dalam desentralisasi asimetris yang diberlakukan khusus di beberapa daerah untuk mengatasi tuntutan politik rakyat yang ingin melepaskan diri dari negara (Kompak, 2021). Adanya otonomi khusus di Provinsi Papua menjadikan provinsi ini memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan pencapaian yang diinginkan berdasarkan aspirasi dan hak hak masyarakat Papua. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, terwujudnya penegakan hukum, serta menghormati hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua (BPKAD Provinsi Papua, 2017).

Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Perda 25/ 2013) pasal 7 dan 8, pembagian penerimaan dana otsus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terlebih dahulu dikurangi dengan pembiayaan pendidikan dan kesehatan

program strategis lintas kabupaten/kota. Setelah dikurangi, dibagi 20% untuk Provinsi Papua dan 80% untuk kabupaten/kota se Provinsi Papua berdasarkan alokasi dasar dan alokasi variabel.

2.2.5 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang disalurkan untuk mendanai desa. Menurut Heru Cahyono (2020), dana desa merupakan hak yang diberikan kepada desa sebagai konsekuensi logis atas rekognisi kepada kesatuan masyarakat hukum. Dana ini di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang fungsinya untuk mendanai hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan kemasyarakatan. Tujuan diberikannya dana desa ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa, meningkatkan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), mengentaskan kemiskinan, mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan dalam pembangunan antardesa (Kementerian Keuangan, 2021).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur tentang regulasi mengenai desa dan dana desa yang dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP 43/2014). Adapun pengelolaannya didasarkan pada asas – asas pengelolaan keuangan desa (Kementerian Keuangan, 2023), yaitu :

- a. Transparan, yaitu pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan dapat mengakses informasi mengenai dana desa dengan sebesar – besarnya.
- b. Akuntabel, yaitu dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dianggap sebagai bentuk kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan.
- c. Partisipatif, yaitu kelembagaan desa dan unsur masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- d. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Adapun mekanisme dalam pencairan dan penyaluran alokasi dana desa yaitu sebagai berikut :

1. Dana desa dicairkan secara bertahap dengan persentase tertentu yang sudah ditetapkan.
2. Pada pencairan tahap pertama, kepala desa mengajukan dana desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang sudah ditentukan.
3. Dana desa dapat dicairkan pada tahap kedua apabila penggunaan dana desa pada tahap pertama telah dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun teknis.
4. Pencairan dana desa dilakukan dengan memindah buku dana dari kas daerah menuju rekening kas desa.
5. Alokasi dana desa dapat disalurkan melalui kas desa kepada pemimpin pelaksanaan kegiatan dalam desa.

Alokasi dana desa dipergunakan sebanyak 30% untuk membiayai seluruh operasional penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan sebanyak 70% dipergunakan membangun sarana dan prasarana desa, pemberdayaan ekonomi desa, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengentaskan kemiskinan, serta membiayai potensi yang ada di desa (Kementerian Keuangan, 2021).

Dalam pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa yang telah disepakati dalam Musyawarah desa dan berdasarkan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 Tentang pengelolaan Dana Desa (PMK 201/2022) ditetapkan sebagai berikut :

$$DD = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan :

1. AD = Alokasi Dasar

AD dihitung dari 65% anggaran dana desa yang dibagikan kepada setiap desa berdasarkan klaster desa dan jumlah penduduk.

2. AA = Alokasi Afirmasi

AA dihitung dari 1% anggaran dana desa dibagikan kepada penduduk miskin yang ditinggal di desa tertinggal dan sangat tertinggal.

3. AK = Alokasi Kinerja

AK dihitung dari 4% anggaran dana desa dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik.

4. AF = Alokasi Formula

AF dihitung dari 30% anggaran dana desa dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut: jumlah penduduk dengan bobot 10%, angka kemiskinan desa dengan bobot 40%, luas wilayah desa dengan bobot 10%, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada Peraturan (Menteri Keuangan, 2022) Nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum, dana alokasi umum dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan dasar pada bidang – bidang tersebut. Dalam meningkatkan kualitas layanan dasar pada bidang pendidikan, DAU dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sehingga nilai IPM dapat naik. Pada bidang pendidikan, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan harapan hidup dan kesehatan masyarakat, tentunya dapat berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan pada bidang pekerjaan umum, dana alokasi umum berperan penting dalam pembiayaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana yang dialokasikan melalui DAU dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas

hidup masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar DAU yang diterima daerah, semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut dapat meningkatkan IPM.

Hubungan antara DAU dan IPM merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. DAU memberikan dukungan finansial yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam IPM. Dengan alokasi yang tepat dan pengelolaan yang efektif, DAU berpotensi besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan regional. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya perhatian terhadap pengelolaan dan penggunaan dana yang efisien serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian IPM.

2.3.2 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini jika dialokasikan secara efisien dan dipergunakan dalam proyek – proyek pembangunan yang mendukung bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, maka dapat meningkatkan nilai IPM suatu daerah.

Dana bagi hasil juga dapat memperkuat perekonomian di suatu daerah. Jika perencanaan pembangunan yang didanai oleh DBH dapat meningkatkan pendidikan dan peluang perekonomian sehingga memberdayakan masyarakat, maka dapat berdampak terhadap IPM suatu daerah ke arah yang lebih positif. Selain itu, DBH yang dialokasikan secara merata di setiap daerah, dapat meningkatkan standar hidup seperti pendistribusian pendapatan yang merata. Pendapatan yang merata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai IPM dapat naik.

2.3.3 Hubungan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

UU Otsus Papua menetapkan pemberian dana otonomi khusus sebesar 2% dari DAU nasional, utamanya disalurkan untuk mendanai bidang pendidikan, kesehatan, dana tambahan infrastruktur untuk menunjang pembangunan yang ada di Provinsi Papua (BPKAD Provinsi Papua, 2017).

Pada pasal 5 Perda Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013, dana otsus diatur untuk diperuntukkan guna membiayai program dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Dana tersebut juga disalurkan untuk memberikan bantuan kepada institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli Papua, dan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, kebutuhan perencanaan pembangunan, serta peningkatan kinerja keuangan otsus.

Sebesar minimal 30% dana otsus disalurkan pada pembiayaan di bidang pendidikan untuk membiayai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pelayanan bidang kesehatan, dana otsus disalurkan minimal 15% untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, perbaikan gizi masyarakat yang dapat mencegah dan memberantasi penyakit, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. Pada pelayanan ekonomi kerakyatan, dana otsus disalurkan minimal 20% untuk membiayai subsidi harga kebutuhan pokok, perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, dan pengembangan komoditi unggulan. Pada pembiayaan pembangunan infrastruktur, dana otsus disalurkan minimal 20% untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pengaliran air bersih, penerangan, dan telekomunikasi. Untuk pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan, dana otsus disalurkan maksimal 6%. Yang terakhir, maksimal 4% dana otsus disalurkan untuk mendanai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah dan pelaporan program dan kegiatan.

Dana otsus yang telah disalurkan pada bidang – bidang tersebut bila dikelola dengan baik dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat membuat perubahan menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat mempengaruhi nilai IPM yang lebih positif.

2.3.4 Hubungan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada desa – desa untuk mendukung dan membiayai pembangunan dalam daerah tersebut. Dana desa yang disalurkan pada bidang pendidikan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti sekolah dan sarana pendidikan lain. Hal ini dapat mengatasi

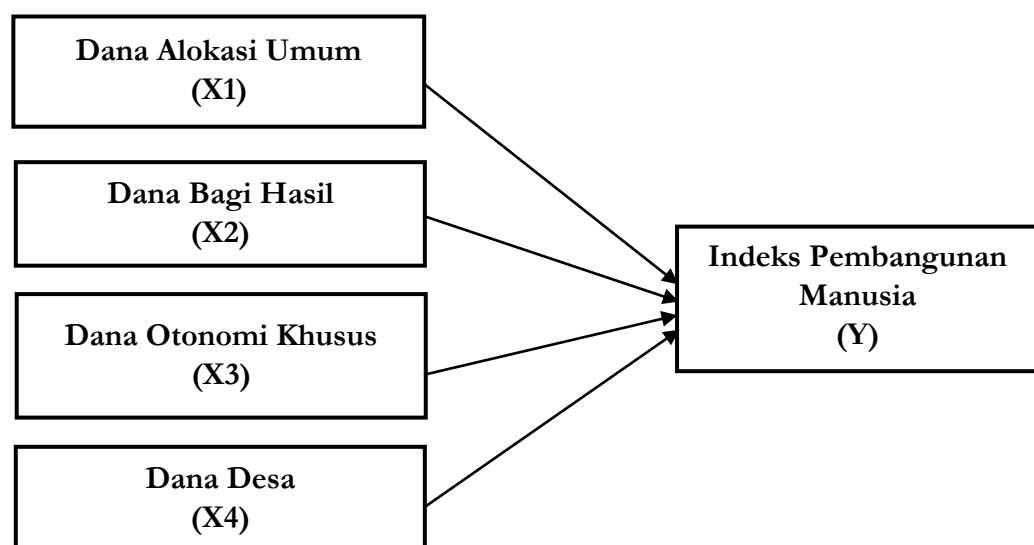
angka buta huruf, memperbaiki rata – rata lama sekolah agar menjadi 12 tahun, serta dapat kemudahan dalam menuntut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan akses pendidikan di desa dapat meningkatkan angka IPM melalui aspek pendidikan.

Dana desa yang disalurkan pada bidang pelayanan kesehatan, digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan. Hal tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan untuk mendapatkan pola hidup yang sehat dan mengentaskan penyakit sehingga masyarakat dapat memiliki harapan hidup yang lebih tinggi.

Dana desa yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi serta infrastruktur untuk mendukung program – program yang dapat berdampak terhadap ekonomi desa seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil, pembangunan sarana dan prasarana desa yang dapat berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan standar hidup masyarakat sehingga dapat mempengaruhi peningkatan IPM.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori yang secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Adapun model kerangka penelitian yang digunakan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat dikatakan sebagai asumsi sementara mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sehingga diperlukan pengujian untuk melihat kebenaran dalam suatu penelitian secara empiris. Hipotesis yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Di duga bahwa dana alokasi umum secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
2. Di duga bahwa dana bagi hasil secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
3. Di duga bahwa dana otonomi khusus secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.
4. Di duga bahwa dana desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Penelitian dan Sumber Data

Data penelitian yang dipakai menggunakan data kuantitatif atau jenis data sekunder berupa data panel yang dipublikasikan oleh lembaga maupun instansi resmi. Data tersebut terdiri dari dua bagian yaitu data *time series* yang digunakan selama 5 tahun dari tahun 2019 – 2023, serta data *cross section* yang digunakan sebanyak 30 yang menunjukkan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Data yang digunakan untuk penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik Papua dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yang akan diteliti yaitu 1 variabel dependen dan 4 variabel independen.

1. Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Maka yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y). IPM merupakan suatu indikator untuk mengukur kesejahteraan manusia dalam upaya membangun kualitas hidup. Data diambil dari tahun 2019 - 2023 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
2. Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Maka yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Dana Alokasi Umum (X1)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk untuk mendanai keperluan daerah otonom serta pemerataan keuangan antar daerah untuk mencapai standar kelayakan layanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data diambil dari tahun 2019 – 2023 yang berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- b. Dana Bagi Hasil (X2)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan yang terjadi di daerah tersebut. Data diambil dari tahun 2019 – 2023 yang berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

c. Dana Otonomi Khusus (X3)

Dana Otonomi Khusus atau dana otsus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun Provinsi Papua mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, terwujudnya penegakan hukum, serta menghormati hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua. Data diambil dari tahun 2019 – 2023 yang berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

d. Dana Desa (X4)

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan kemasyarakatan. Data diambil dari tahun 2019 – 2023 yang berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.3 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Data panel merupakan data yang menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section*. Data time series atau data runtut waktu adalah data yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu, sedangkan data cross section atau data antar tempat atau ruang adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap sample. Menurut Widarjono (2018), terdapat beberapa keuntungan menggunakan data panel yaitu data panel dapat menyediakan lebih banyak data sehingga mampu menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan keuntungan yang kedua yaitu data panel dapat menjadi solusi ketika terjadi permasalahan penghilangan variabel (*omitted-variable*). Alat analisis yang akan digunakan menggunakan Eviews 10.

Adapun persamaan model regresi data panel tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y	= Indeks Pembangunan Manusia
α	= Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	= Koefisien regresi variabel independen
X_1	= Dana Alokasi Umum
X_2	= Dana Bagi Hasil
X_3	= Dana Otonomi Khusus
X_4	= Dana Desa
e	= <i>Term Of Error</i>

1. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

a. Metode Estimasi Data Panel

1. *Common Effect*

Metode *common effect* menjadi pendekatan yang paling sederhana dalam mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* untuk mengolah data. Metode pendekatan ini tidak memperhatikan adanya dimensi individu maupun waktu. Artinya, diasumsikan bahwa koefisien baik *intercept* maupun *slope* dalam kurun waktu tertentu itu sama atau konstan.

2. *Fixed Effect*

Metode *fixed effect* merupakan metode pendekatan yang mengasumsikan adanya perbedaan *intercept* namun koefisien regresi atau *slope* tetap antar individu.

3. *Random Effect*

Metode random effect merupakan metode pendekatan yang menggunakan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saling berhubungan antar waktu maupun antar individu. Setiap individu memiliki perbedaan *intercept* dan berlaku dalam pengambilan sampel individu.

b. Pemilihan Metode

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* merupakan pengujian untuk memilih metode terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect*. Probabilitas *Cross section F* sebesar 0,05 digunakan untuk mengetahui keberhasilan uji *Chow*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* yaitu :

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *Cross section F* lebih dari 0.05 dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 sehingga model yang terpilih adalah *common effect*, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05 maka menolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* atau uji LM merupakan pengujian untuk memilih metode terbaik antara *common effect* dengan *random effect*. Probabilitas *Breusch-Pagan Cross-section* sebesar 0,05 digunakan untuk mengetahui keberhasilan uji LM. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM yaitu :

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Random Effect*

Jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan Cross-section* lebih dari 0,05 dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 sehingga model yang terpilih adalah *common effect*, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05 maka menolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

3. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* merupakan pengujian untuk memilih metode terbaik antara *random effect* dengan *fixed effect*. Probabilitas *Cross section* sebesar 0,05 digunakan untuk mengetahui keberhasilan uji *Hausman*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* yaitu :

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *Cross section* lebih dari 0,05 dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 sehingga model yang

terpilih adalah *random effect*, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05 maka menolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Artinya, uji F ini digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi layak atau tidak. Jika nilai Prob (*F-statistic*) $< \alpha = 5\%$, maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Prob (*F-statistic*) $> \alpha = 5\%$, maka seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji T (Uji Parsial)

Uji T atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Artinya, uji T ini digunakan untuk membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikan. Jika nilai Prob $< \alpha = 5\%$, maka variabel independen secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Prob $> \alpha = 5\%$, maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan model terhadap variabel dependen. Artinya, uji R^2 ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Jika nilai R^2 semakin mendekati nol, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen itu kurang baik atau kecil. Sedangkan jika nilai R^2 semakin mendekati satu, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu baik atau berpengaruh besar.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pada hasil analisis dan pembahasan ini akan menjelaskan hasil penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan data panel 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2023. Data yang digunakan untuk penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah data *time series* dan data *cross section* yang berjumlah 30 sampel. Pengujian estimasi ini menggunakan bantuan program Eviews 10.

4.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang diperoleh melalui nilai rata – rata (*mean*), deviasi standar, nilai tengah (*median*), nilai tertinggi (*maximum*), dan nilai terendah (*minimum*).

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

	IPM	DAU	DBH	DOTSUS	DD
Mean	58.03228	670.1945	86.46083	100.0054	178.4806
Median	56.70000	655.9600	38.42000	100.4500	151.0600
Maximum	81.14000	1272.040	1982.710	265.7700	428.1700
Minimum	30.75000	408.3200	27.72000	29.01000	11.10000
Std. Dev.	11.01918	148.9560	240.4948	48.59905	101.6210
Observations	145	145	145	145	145

Sumber : Lampiran II. Analisis Deskriptif

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil analisis statistik deskriptif pada variabel dependen dan independen memiliki mean yang lebih besar daripada daripada nilai standar deviasi, artinya data tersebut bersifat homogen atau tidak bervariasi.

Nilai rata – rata atau *mean* pada variabel indeks pembangunan manusia (IPM) selama 2019 – 2023 diperoleh sebesar 58,03% dengan nilai tertinggi atau *maximum*

sebesar 81.14% yang dimiliki oleh Kota Jayapura dan nilai terendah atau *minimum* sebesar 30,75 % yang dimiliki oleh Kabupaten Nduga.

Nilai rata – rata atau *mean* pada variabel dana alokasi umum (DAU) diperoleh sebesar 670.1945 miliar rupiah dengan nilai tertinggi atau *maximum* sebesar 1272.040 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke. Sedangkan nilai terendah atau *minimum* pada variabel DAU sebesar 408.3200 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Supiori.

Nilai rata – rata atau *mean* pada variabel dana bagi hasil (DBH) diperoleh sebesar 86.46083 miliar rupiah dengan nilai tertinggi atau *maximum* sebesar 1982.710 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Mimika. Sedangkan nilai terendah atau *minimum* pada variabel DBH sebesar 27.72000 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Pegunungan Bintang.

Nilai rata – rata atau *mean* pada variabel dana otonomi khusus diperoleh sebesar 100.0054 miliar rupiah dengan nilai tertinggi atau *maximum* sebesar 265.7700 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Yahukimo. Sedangkan nilai terendah atau *minimum* pada variabel dana otonomi khusus sebesar 29.01000 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom.

Nilai rata – rata atau *mean* pada variabel dana desa diperoleh sebesar 178.4806 miliar rupiah dengan nilai tertinggi atau *maximum* sebesar 428.1700 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Tolikara. Sedangkan nilai terendah atau *minimum* pada variabel dana desa sebesar 11.10000 miliar rupiah yang dimiliki oleh Kota Jayapura.

4.3 Hasil dan Analisis

4.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Metode estimasi regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Tabel 4.2 *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.60539	3.900127	15.28293	0.0000
DAU	0.011090	0.005632	1.968914	0.0509
DBH	0.012029	0.003279	3.668359	0.0003
DOTSUS	-0.007770	0.016568	-0.469000	0.6398
DD	-0.051929	0.008452	-6.143737	0.0000

R-squared	0.291894
Adjusted R-squared	0.271663
F-statistic	14.42765
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Lampiran III. *Common Effect*

Tabel 4.3 Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.95996	1.214735	52.65344	0.0000
DAU	-0.008955	0.001616	-5.541275	0.0000
DBH	0.001002	0.000743	1.349982	0.1797
DOTSUS	0.008331	0.001344	6.200716	0.0000
DD	-0.004740	0.002414	-1.963867	0.0520
R-squared	0.997490			
Adjusted R-squared	0.996772			
F-statistic	1390.712			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran IV. *Fixed Effect*

Tabel 4.4 Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.00346	2.150223	29.76596	0.0000
DAU	-0.008810	0.001603	-5.497610	0.0000
DBH	0.001111	0.000739	1.503164	0.1350
DOTSUS	0.008202	0.001339	6.125458	0.0000
DD	-0.005507	0.002393	-2.301373	0.0228
R-squared	0.516712			
Adjusted R-squared	0.502903			
F-statistic	37.42054			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran V. *Random Effect*

4.3.2 Pemilihan Model

4.3.2.1 Uji *Chow*

Uji *Chow* merupakan pengujian untuk memilih metode terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect*. Probabilitas *Cross section F* sebesar 0,05 digunakan untuk mengetahui keberhasilan uji *Chow*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* yaitu :

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *Cross section F* lebih dari 0.05 dengan tingkat signifikan atau $\alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 sehingga model yang terpilih adalah *common effect*, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05 maka menolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1124.285019	(28,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	818.113159	28	0.0000

Sumber : Lampiran VI. Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* diatas dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas *Cross-section F* sebesar $0,0000 < \alpha = 5\%$ sehingga menolak H_0 . Artinya dalam penelitian ini model yang terbaik adalah model *fixed effect*.

4.3.2.2 Uji *Hausman*

Uji *Hausman* merupakan pengujian untuk memilih metode terbaik antara *random effect* dengan *fixed effect*. Probabilitas *Cross section* sebesar 0,05 digunakan untuk mengetahui keberhasilan uji *Hausman*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* yaitu :

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *Cross section* lebih dari 0,05 dengan tingkat signifikan atau $\alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 sehingga model yang terpilih adalah *random effect*, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05 maka menolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.442372	4	0.0143

Sumber : Lampiran VII. Hasil Uji Hausman

Berdasarkan hasil pengujian uji *Hausman* diatas dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas *Cross-section random* sebesar $0,0143 < \alpha = 5\%$ sehingga menolak H_0 . Artinya dalam penelitian ini model yang terbaik adalah model *fixed effect*.

4.3.3 Estimasi Model Regresi *Fixed Effect*

Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua diperlukan estimasi model regresi dengan menggunakan data panel. Setelah dilakukan pemilihan model yang terbaik dalam pengujian model maka diperoleh hasil estimasi terbaik sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.95996	1.214735	52.65344	0.0000
DAU	-0.008955	0.001616	-5.541275	0.0000
DBH	0.001002	0.000743	1.349982	0.1797
DOTSUS	0.008331	0.001344	6.200716	0.0000
DD	-0.004740	0.002414	-1.963867	0.0520
R-squared	0.997490			
Adjusted R-squared	0.996772			
F-statistic	1390.712			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran IV. *Fixed Effect*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil persamaan estimasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 IPM_{it} &= \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DOTSUS_{it} + \beta_4 DD_{it} + e_{it} \\
 &= 63.95996 - 0.008955 DAU + 0.001002 DBH + 0.008331 DOTSUS - \\
 &\quad 0.004740 DD + e
 \end{aligned}$$

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

t : Tahun yang diteliti 2019 – 2023

i : Provinsi

β_0 : *Intercept* (konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi masing – masing variabel

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DOTSUS : Dana Otonomi Khusus

DD : Dana Desa

e : Error

Dari tabel hasil estimasi model *fixed effect* diatas dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia sebesar 63.95996 persen dengan asumsi variabel independen lain tidak ada.

- a. Dana Alokasi Umum naik sebesar 1 milyar maka dapat menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar -0.008955 persen.
- b. Dana Bagi Hasil naik sebesar 1 milyar maka dapat menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.001002 persen.
- c. Dana Otonomi Khusus naik sebesar 1 milyar maka dapat menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.008331 persen.
- d. Dana Desa naik sebesar 1 milyar maka dapat menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar -0.004740 persen.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.1.3.1 Uji T

Uji T merupakan pengujian secara individu yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel – variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Pengujian Terhadap Koefisien Dana Alokasi Umum (β_1)

Berdasarkan hasil pengujian dari koefisien dana alokasi umum didapatkan nilai sebesar -0.008955 sementara t-hitung sebesar -5.541275 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ sehingga variabel dana alokasi umum (X1) secara statistik signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (Y) dimana menolak H_0 . Artinya model estimasi *fixed effect* variabel dana alokasi umum (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

2. Pengujian Terhadap Koefisien Dana Bagi Hasil (β_2)

Berdasarkan hasil pengujian dari koefisien dana bagi hasil didapatkan nilai sebesar 0.001002 sementara t-hitung sebesar 1.349982 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.1797 > \alpha = 5\%$ sehingga variabel dana bagi hasil (X2) secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (Y) dimana gagal menolak H_0 . Artinya model estimasi

fixed effect variabel dana bagi hasil (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

3. Pengujian Terhadap Koefisien Dana Otonomi Khusus (β_3)

Berdasarkan hasil pengujian dari koefisien dana otonomi khusus didapatkan nilai sebesar 0.008331 sementara t-hitung sebesar 6.200716 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ sehingga variabel dana otonomi khusus (X3) secara statistik signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (Y) dimana menolak H_0 . Artinya model estimasi *fixed effect* variabel dana otonomi khusus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

4. Pengujian Terhadap Koefisien Dana Desa (β_4)

Berdasarkan hasil pengujian dari koefisien dana alokasi umum didapatkan nilai sebesar -0.004740 sementara t-hitung sebesar -1.963867 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.0520 < \alpha = 10\%$ sehingga variabel dana desa (X4) secara statistik signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (Y) dimana menolak H_0 . Artinya model estimasi *fixed effect* variabel dana desa (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

4.1.3.2 Uji F

Uji F merupakan pengujian secara menyeluruh atau simultan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel – variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai *F-statistic* sebesar 1390.712 dengan nilai probabilitas *F-statistic* yang dihasilkan sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$ sehingga variabel independen dana alokasi umum (X1), dana bagi hasil (X2), dana otonomi khusus (X3), dan dana desa (X4) secara statistik bersama – sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia (Y).

4.1.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian estimasi *fixed effect* didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.997490. Artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dana alokasi umum (X1), dana bagi hasil (X2), dana otonomi khusus (X3), dan dana desa (X4) mampu menjelaskan variabel dependen indeks

pembangunan manusia (Y) sebesar 99.99%, sedangkan sisanya sebesar 0.01% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3.5 Analisis *Cross Section Effect*

Tabel 4.8 *Cross Section Effect*

No	Kabupaten/Kota	<i>Effect</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Intercept</i>
1	Kabupaten Merauke	1.759.507	63.95996	65.719467
2	Kabupaten Jayawijaya	1.627.840	63.95996	65.587800
3	Kabupaten Jayapura	1.419.435	63.95996	65.379395
4	Kabupaten Nabire	1.141.049	63.95996	65.101009
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	8.933.457	63.95996	72.893417
6	Kabupaten Biak Numfor	1.404.289	63.95996	65.364249
7	Kabupaten Paniai	-1.914.793	63.95996	62.045167
8	Kabupaten Puncak Jaya	-7.818.815	63.95996	56.141145
9	Kabupaten Mimika	1.475.044	63.95996	65.435004
10	Kabupaten Boven Digoel	5.109.357	63.95996	69.069317
11	Kabupaten Mappi	1.695.845	63.95996	65.655805
12	Kabupaten Asmat	-4.509.024	63.95996	59.450936
13	Kabupaten Yahukimo	-6.686.400	63.95996	57.273560
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	-9.956.953	63.95996	54.003007
15	Kabupaten Tolikara	-6.343.340	63.95996	57.616620
16	Kabupaten Sarmi	6.213.064	63.95996	70.173024
17	Kabupaten Keerom	7.501.224	63.95996	71.461184
18	Kabupaten Waropen	6.281.530	63.95996	70.241490
19	Kabupaten Supiori	2.903.537	63.95996	66.863497
20	Kabupaten Mamberamo Raya	-5.302.679	63.95996	58.657281
21	Kabupaten Nduga	-2.554.313	63.95996	61.405647
22	Kabupaten Lanny Jaya	-8.790.385	63.95996	55.169575
23	Kabupaten Mamberamo Tengah	-1.027.782	63.95996	62.932178
24	Kabupaten Yalimo	-9.035.225	63.95996	54.924735
25	Kabupaten Puncak	-1.361.988	63.95996	62.597972
26	Kabupaten Dogiyai	-4.378.506	63.95996	59.581454

27	Kabupaten Intan Jaya	-9.548.673	63.95996	54.411287
28	Kabupaten Deiyai	-9.888.980	63.95996	54.070980
29	Kota Jayapura	2.135.552	63.95996	66.095512

Sumber : *Cross Section Fixed Effect*, data diolah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu berada di Kabupaten Yapen dengan nilai *intercept* sebesar 72.893417. Selain itu, indeks pembangunan manusia terendah yaitu berada di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan nilai *intercept* sebesar 54.003007.

4.4 Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis data diatas, didapatkan model yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan model *fixed effect*. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan nilai koefisien sebesar -0.008955 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ sehingga disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.

Dana alokasi umum menjadi komponen yang utama dalam pengalokasian dana dari pusat untuk daerah. Dalam penelitian ini, menunjukkan DAU memiliki hubungan yang negatif terhadap IPM Provinsi Papua. Setiap peningkatan 1 persen DAU di Provinsi Papua, maka IPM Provinsi Papua dapat menurun sebesar 0.008955 persen. Hal ini disebabkan belanja pegawai di Provinsi Papua pada tahun 2021 Rp 4.196529.811.863,00 lebih besar dari DAU tahun 2021 yang sebesar Rp 2.314.920.067.000,00 (BPKAD Provinsi Papua, 2021). Besarnya belanja pegawai daripada DAU masih dipengaruhi oleh anggaran dasar yang digunakan untuk belanja pegawai. Artinya, pemerintah lebih berfokus terhadap belanja pegawai daripada peningkatan program-program yang secara langsung mempengaruhi komponen IPM. Pengeluaran yang lebih tinggi untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup mereka, dampaknya terhadap IPM akan tetap minimal. Dalam

hal ini, faktor lain dianggap tetap, sehingga apabila dana alokasi umum dinaikkan tidak mampu untuk menaikkan indeks pembangunan manusia.

Sebagai contoh penyalahgunaan DAU yang dirilis oleh Tribatanews Jayapura (2024) yang menyatakan bahwa adanya penyalahgunaan dana pembangunan jalan. Dari kasus tersebut dapat menggambarkan bahwa adanya penyalahgunaan alokasi dana juga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana – dana yang seharusnya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk kepentingan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pengaruhnya dana alokasi umum terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi negatif. Hal tersebut dapat mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa, dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini tidak sejalan dengan Fahrudin dan Susilo (2022) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis data diatas, didapatkan nilai koefisien sebesar 0.001002 sementara t-hitung sebesar 1.349982 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.1797 > \alpha = 5\%$ sehingga dana bagi hasil secara statistik tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Artinya, kenaikan dana bagi hasil dapat menaikkan indeks pembangunan manusia tetapi tidak signifikan.

Penerimaan DBH di Provinsi Papua pada tahun 2019 - 2023 menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan dana alokasi yang lain. Terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (earmarking). Komponen tersebut diantaranya DBH migas yang dipergunakan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar dan DBH kehutanan yang sumbernya berasal dari dana reboisasi yang dipergunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Hal tersebut membuat total DBH yang digunakan secara fleksibel melalui output belanja modal untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat terbatas.

DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Tujuannya untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk menyediakan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi daerah tersebut. Dalam hal ini, pengalokasian DBH menjadi tidak merata. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan potensi dari sumber daya alam pada masing – masing kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sehingga, alokasi dana yang tinggi berfokus pada wilayah tertentu saja. Oleh karena itu, dana tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan IPM yang rendah karena DBH digunakan untuk membiayai objek tertentu yang menghasilkan bagi daerah bukan infrastruktur umum.

Penelitian ini sejalan dengan Fahrudin dan Susilo (2022) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Agustina (2022) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil yang dialokasikan dapat menjaga kesenjangan antara pusat dan daerah karena berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, masih terdapat kesenjangan antardaerah karena adanya ketidakmerataan pengalokasian dana.

3. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis data diatas, didapatkan nilai koefisien sebesar 0.008331 sementara t-hitung sebesar 6.200716 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ sehingga dana otonomi khusus secara statistik signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dana otonomi khusus dapat menaikkan indeks pembangunan manusia. Artinya, dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih transparan, alokasi yang tepat untuk program-program pembangunan yang prioritas, serta implementasi yang baik dari program-program ini di tingkat daerah. Dengan demikian, dana otonomi khusus dapat memberikan dorongan positif bagi pembangunan manusia di Provinsi Papua. Meskipun pengaruh dari dana otonomi khusus ini

memberikan peningkatan indeks pembangunan manusia yang kecil. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk, kondisi alam Provinsi Papua, alokasi anggaran, luas wilayah, budaya masyarakat Papua, kinerja dari Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua, dan sebagainya.

Luas wilayah Provinsi Papua sangat besar yaitu sebesar 319,036 km². Kondisi wilayah tersebut juga bervariasi ada yang berupa dataran rendah, wilayah yang berawa-rawa, ada juga pegunungan yang masih sulit untuk diakses, sehingga dalam pembangunannya menghadapi tantangan yang luar biasa. Jarak antardaerah yang sangat jauh, sulitnya akses transportasi, kepadatan masyarakat yang rendah, dan juga banyak masyarakat yang belum melek teknologi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Tentu saja hal ini sejalan dengan tujuan adanya dana otonomi khusus yang diperuntukkan Provinsi Papua untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, keadilan, percepatan pembangunan ekonomi, dan kemajuan masyarakat Papua. Sehingga, masyarakat Papua tidak mengalami kondisi ketertinggalan dan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia Provinsi Papua. Penelitian ini sejalan dengan Juliarini dan Hatmoko (2020) yang menyatakan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Boky (2023) dan Muhtarulloh (2021) yang menyatakan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis data diatas, didapatkan nilai koefisien sebesar -0.004740 sementara t-hitung sebesar -1.963867 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar $0.0520 < \alpha = 10\%$ disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dana desa dapat mengakibatkan penurunan indeks pembangunan manusia. Artinya, secara signifikan dana desa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua, namun tidak dapat menaikkan indeks pembangunan manusia.

Dana desa ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan drainase yang ada di desa. Alokasi dana desa belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Terlebih lagi jika dana tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum tertentu demi kepentingan pribadi.

Seperti dalam kasus yang dirilis BPK RI (BPK RI, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan dana desa. Kasus ini telah berlangsung secara terus menerus setiap tahunnya. Jika kasus ini tidak segera ditangani, korupsi ini akan terus berlanjut sehingga tujuan dari penyaluran dana desa untuk menyejahterakan masyarakat tidak dapat tercapai.

Adanya kasus korupsi inilah menyebabkan ketidakmerataan penyaluran dana desa yang diperuntukkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan perbaikan fasilitas umum yang dapat mendorong perekonomian yang ada di desa sehingga dampaknya terjadi ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dan ekonomi yang belum optimal pada akhirnya tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua. Penelitian ini tidak sejalan dengan Fahrudin dan Susilo (2022) dan Rimawan dan Aryani (2019) yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan juga pembahasan, variabel – variabel yang meliputi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2019 – 2023 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dana alokasi umum dapat mengakibatkan penurunan indeks pembangunan manusia. DAU belum sepenuhnya berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan dampak negatif ini termasuk penggunaan DAU yang tidak efisien, kurangnya koordinasi dalam pengalokasiannya, serta tantangan dalam implementasi program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana bagi hasil secara statistik tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Ketidaksignifikan ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan penghapusan pembatasan penggunaan dana sebesar 0,5 persen dari DBH SDA minyak dan gas bumi yang sebelumnya hanya untuk bidang pendidikan menjadi dapat digunakan untuk kebutuhan daerah. Selain itu, adanya ketidakmeratanya pengalokasian dana bagi hasil. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan potensi dari sumber daya alam pada masing – masing kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sehingga, alokasi dana yang tinggi berfokus pada wilayah tertentu saja, sedangkan penyaluran dana pada kabupaten/kota yang lain hanya mendapatkan DBH pemerataan yang mana dana tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan IPM yang rendah karena ketidakmampuannya dalam memperbaiki pembangunan daerah.

Sehingga kualitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian antardaerah mengalami kesenjangan.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Artinya, adanya kenaikan dana otonomi khusus dapat menaikkan indeks pembangunan manusia. Pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih transparan, alokasi yang tepat untuk program-program pembangunan yang prioritas, serta implementasi yang baik dari program-program ini di tingkat daerah. Dengan demikian, dana otonomi khusus dapat memberikan dorongan positif bagi pembangunan manusia di Provinsi Papua. Meskipun pengaruh dari dana otonomi khusus ini memberikan peningkatan indeks pembangunan manusia yang kecil. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk, kondisi alam Provinsi Papua, alokasi anggaran, luas wilayah, budaya masyarakat Papua, kinerja dari Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua, dan sebagainya. Tentu saja hal ini sejalan dengan tujuan adanya dana otonomi khusus yang diperuntukkan Provinsi Papua untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, keadilan, percepatan pembangunan ekonomi, dan kemajuan masyarakat Papua. Sehingga, masyarakat Papua tidak mengalami kondisi ketertinggalan dan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia Provinsi Papua.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dana desa dapat mengakibatkan penurunan indeks pembangunan manusia. Artinya, secara signifikan dana desa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua, namun tidak dapat menaikkan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini mengungkap bahwa alokasi dana desa belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Penggunaan dana desa yang belum efektif dan efisien dapat menyebabkan pengalokasian yang tidak tepat sasaran yang pada akhirnya

tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua.

5.2 Implikasi

1. Penggunaan dana alokasi umum seharusnya lebih ditekankan untuk kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dana alokasi umum dipergunakan untuk belanja pegawai daripada pengeluaran untuk peningkatan infrastruktur atau pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah berfokus pada meningkatkan IPM karena salah satu penentu DAU yaitu kondisi IPM daerah. Selain itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan dari masyarakat untuk menghindari penggunaan dana alokasi umum yang tidak sesuai. Anggaran yang direncanakan harus tepat sasaran terlebih lagi pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mampu mendorong masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Tentu saja ini sesuai dengan UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja serta adanya perbaikan pada pengelolaan belanja daerah dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Terkait alokasi dana bagi hasil seharusnya perlu adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta program yang berkaitan dengan pemanfaatan DBH. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar program – program yang akan dilaksanakan selaras dengan tujuan nasional dan daerah. Perlu adanya mekanisme yang kuat dari pemerintah daerah terhadap program – program yang bertujuan untuk meningkatkan IPM Provinsi Papua. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara evaluasi berkelanjutan, serta adanya publikasi tentang informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat. Selanjutnya, perlu juga dilakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi yang sudah ada namun belum dimanfaatkan di setiap Kabupaten/Kota di

Provinsi Papua. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penggunaan dana otonomi khusus dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Diperlukan partisipasi dari semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dalam mengalokasikan, mengelola, dan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus, serta melakukan pengawasan terhadapnya. Langkah ini dapat diwujudkan melalui pembuatan regulasi yang ketat, perencanaan yang cermat dalam memilih program/kegiatan yang akan dilaksanakan, merumuskan output dan hasil yang diharapkan, serta memberlakukan sanksi kepada pemerintah daerah apabila hasilnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Daerah Papua perlu untuk membagikan Dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dengan cara melakukan pendataan kebutuhan dengan data pembobotan yang lengkap agar dapat menjadi panduan yang tepat. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Penggunaan dana desa dapat dipergunakan untuk pembangunan desa yang berada di Provinsi Papua. Pembangunan tersebut memerlukan pengelolaan yang baik. Pentingnya pemeriksaan oleh pemerintah pusat terhadap pengalokasian dana desa agar prosesnya dapat berjalan secara efektif. Penerapan dana desa yang efisien akan mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kekurangan dalam periode penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan data selama 5 tahun terakhir. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian sehingga dapat memberikan pertimbangan lain dalam mengkaji Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2022). Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(1), 51–60. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id>
- Boky, N. A. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 03(3), 658–664. <https://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.16>
- Booklet. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. *Badan Pusat Statistik*, 102–106.
- BPK RI. (2020, January 14). *5 Kabupaten Ini Diduga Korupsi Dana Desa, Apdesi Papua Buka Suara*. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia .
- BPKAD Provinsi Papua. (2017). *Penerimaan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. <https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-pengalokasian-dana-otsus-papua.htm>
- Fahrudin, A. A., & Susilo. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1. <https://doi.org/10.21776/jdess>
- Heru Cahyono, dkk. (2020). *Pengelolaan Dana Desa : Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. LIPI Press.
- Juliarini, A., & Hatmoko, A. W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 335–1115.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Dana Bagi Hasil*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Asas Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kompak. (2021). *Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022–2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri*.
- Marhaeni, H., Yati, S., & Tribudhi, B. (2008). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006 - 2007*. Badan Pusat Statistik.
- Mudrajat, K. (2014). *Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Muhtarulloh, F. (2021). Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Terhadap Ipm. *Jurnal Budget*, 6(1), 96–113. <https://6.jurnal-budget-Vol6Ed1-2021-119-136>
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah*.
- Tribatanews. (2024, April 19). *Penyalahgunaan Dana Pembangunan, Polisi Limpahkan 4 Tersangka Kasus Korupsi ke Kejaksaan di Papua*. Tribatanews.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (2014).

- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.* (2013).
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. (2001). *Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang - Undang HKPD Tentang APBN.*
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3).
- Santoso, R. P. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik.* UPP STIM YKPN.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>
- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik.* Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan Ekonomi* (M. P. Todaro & S. C. Smith, Eds.; 12th ed.). Pearson.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran I Tabel Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	IPM (%)	DAU (Miliar Rupiah)	DBH (Miliar Rupiah)	DOK (Miliar Rupiah)	DD (Miliar Rupiah)
Kabupaten Merauke	2019	69,98	1248,68	61,97	102,51	220,53
Kabupaten Merauke	2020	70,09	1272,04	58,35	48,49	228,07
Kabupaten Merauke	2021	70,49	1158,16	55,82	48,5	238,21
Kabupaten Merauke	2022	71,24	1122,85	63,22	139,82	187,14
Kabupaten Merauke	2023	72,19	1176,57	66	196,45	185,15
Kabupaten Jayawijaya	2019	57,79	748,74	37,85	117,04	280,67
Kabupaten Jayawijaya	2020	58,03	764,15	37,62	51,35	285,53
Kabupaten Jayawijaya	2021	58,67	684,43	35,4	51,36	281,99
Kabupaten Jayawijaya	2022	59,6	662,51	40,33	181,01	263,61
Kabupaten Jayawijaya	2023	60,5	698,26	38,69	179,92	262,59
Kabupaten Jayapura	2019	71,84	705,73	39,75	103,58	128,84
Kabupaten Jayapura	2020	71,69	725,21	40,62	46,07	138,02
Kabupaten Jayapura	2021	72,03	649,247	38,88	46,07	134,51
Kabupaten Jayapura	2022	72,67	629,52	45,62	117,16	116,27
Kabupaten Jayapura	2023	73,5	662,35	46,57	161,42	117,1
Kabupaten Nabire	2019	68,53	729,81	49,59	100,98	90,73
Kabupaten Nabire	2020	68,83	750,87	45,78	45,75	95,1
Kabupaten Nabire	2021	69,15	683,7	42,95	45,76	97,67
Kabupaten Nabire	2022	69,91	662,36	48,41	128,22	76,7
Kabupaten Nabire	2023	70,84	696,14	51,05	132,99	75,17
Kabupaten Kepulauan Yapen	2019	67,76	567,38	35,13	94,65	135,7
Kabupaten Kepulauan Yapen	2020	67,66	591,65	36,07	45,99	140,44
Kabupaten Kepulauan Yapen	2021	67,72	529,88	33,72	45,99	138,72
Kabupaten Kepulauan Yapen	2022	68,41	513,13	38,42	128,02	128,09
Kabupaten Kepulauan Yapen	2023	69,11	539,51	41,82	128,39	118,12
Kabupaten Biak Numfor	2019	72,57	608,6	38,63	100,1	202,71
Kabupaten Biak Numfor	2020	72,19	613,08	37,31	32,25	209,68
Kabupaten Biak Numfor	2021	72,33	549,97	35,15	32,26	206,93
Kabupaten Biak Numfor	2022	72,85	532,36	39,93	123,9	193,39
Kabupaten Biak Numfor	2023	73,46	562,82	42,43	143,3	185,9
Kabupaten Paniai	2019	56,58	604,52	40,16	115,55	195,98
Kabupaten Paniai	2020	56,31	622,21	36,26	64,18	201,53
Kabupaten Paniai	2021	56,7	556,71	33,43	64,19	201,08

Kabupaten Paniai	2022	57,14	538,88	38,58	161,52	190,04
Kabupaten Paniai	2023	57,91	563,01	99,05	150,91	188,38
Kabupaten Puncak Jaya	2019	48,33	782,42	35,99	128,55	280,48
Kabupaten Puncak Jaya	2020	48,37	796,83	35,62	64,62	294,08
Kabupaten Puncak Jaya	2021	48,99	713,32	33,37	64,62	290,82
Kabupaten Puncak Jaya	2022	49,84	690,77	38,29	180,2	274,99
Kabupaten Puncak Jaya	2023	50,81	716,17	37,52	199,25	278,83
Kabupaten Mimika	2019	74,13	634,12	936,76	100,95	146,71
Kabupaten Mimika	2020	74,19	637,28	966,37	31,3	150,21
Kabupaten Mimika	2021	74,48	569,06	1234,11	31,31	151,06
Kabupaten Mimika	2022	75,08	550,84	1361,21	135,88	132,37
Kabupaten Mimika	2023	75,91	583,75	1982,71	149,17	127,46
Kabupaten Boven Digoel	2019	61,51	848,39	46,25	100,45	136,2
Kabupaten Boven Digoel	2020	61,53	852,28	44,56	59,98	145,03
Kabupaten Boven Digoel	2021	61,62	771,36	42,74	59,98	151,8
Kabupaten Boven Digoel	2022	62,52	746,66	49,53	128,97	114,75
Kabupaten Boven Digoel	2023	63,46	775,3	47,18	126,32	113,61
Kabupaten Mappi	2019	58,3	797,77	38,24	104,09	180,92
Kabupaten Mappi	2020	58,15	801,64	38,42	61,68	190,12
Kabupaten Mappi	2021	58,7	720,38	35,42	61,69	193,41
Kabupaten Mappi	2022	59,61	697,79	39,89	143,17	174,37
Kabupaten Mappi	2023	60,57	727,07	40,19	195,44	173,58
Kabupaten Asmat	2019	50,37	913,22	37,77	105,68	246,96
Kabupaten Asmat	2020	50,55	922,74	38,74	61,93	252,16
Kabupaten Asmat	2021	51,29	842,86	35,37	61,94	255,25
Kabupaten Asmat	2022	52,22	815,86	40,18	151,65	232,92
Kabupaten Asmat	2023	53,19	846,7	101,79	188,43	227,53
Kan. Yahukimo	2019	49,25	763,67	38,84	110,69	405,93
Kan. Yahukimo	2020	49,37	787,64	36,69	65,59	414,65
Kan. Yahukimo	2021	49,48	718,68	33,81	65,6	409,14
Kan. Yahukimo	2022	50,25	695,66	38,79	210,87	427,04
Kan. Yahukimo	2023	51,19	733,04	38,5	265,77	427,45
Kabupaten Pegunungan Bintang	2019	45,21	868,13	41,07	114,47	253,27
Kabupaten Pegunungan Bintang	2020	45,44	871,11	27,72	62,59	265,57
Kabupaten Pegunungan Bintang	2021	46,28	789,92	37,53	62,59	264,45
Kabupaten Pegunungan Bintang	2022	47,21	764,62	42,96	157,85	237,95
Kabupaten Pegunungan Bintang	2023	48,18	792,84	41,09	160,43	231,67
Kabupaten Tolikara	2019	49,68	752,19	38,33	84,8	419,51
Kabupaten Tolikara	2020	49,5	781,24	35,68	64,75	428,17
Kabupaten Tolikara	2021	49,6	700,41	32,94	64,76	422,32

Kabupaten Tolikara	2022	50,51	677,98	37,89	195,5	414,58
Kabupaten Tolikara	2023	51,48	704,32	37,11	168,86	411,18
Kabupaten Sarmi	2019	63,45	726,77	46,97	69,21	99,02
Kabupaten Sarmi	2020	63,63	730,33	45,66	44,4	106,97
Kabupaten Sarmi	2021	63,94	652,45	42,72	44,4	110,8
Kabupaten Sarmi	2022	64,86	631,56	48,82	116,36	85,43
Kabupaten Sarmi	2023	65,8	656,41	55,56	123,14	85,74
Kabupaten Keerom	2019	66,59	556,66	41,85	94,89	99,45
Kabupaten Keerom	2020	66,4	562,6	41,58	29,01	99,45
Kabupaten Keerom	2021	66,49	508,41	39,02	29,02	99,68
Kabupaten Keerom	2022	67,24	492,21	44,29	108,62	81,79
Kabupaten Keerom	2023	68,08	514,48	43,77	104,21	78,23
Kabupaten Waropen	2019	65,34	582,57	37,89	100,8	102,97
Kabupaten Waropen	2020	64,94	598,84	38,4	43,82	105,32
Kabupaten Waropen	2021	65,1	539,9	34,82	43,83	105,1
Kabupaten Waropen	2022	65,67	522,61	39,27	115,99	84,49
Kabupaten Waropen	2023	66,46	543,83	38,76	98,12	82,49
Kabupaten Supiori	2019	62,3	464,14	33,77	86,51	42,26
Kabupaten Supiori	2020	62,3	467,73	34,47	43,4	43,75
Kabupaten Supiori	2021	62,72	421,83	32,36	43,4	44,16
Kabupaten Supiori	2022	63,65	408,32	37,4	99,72	297,36
Kabupaten Supiori	2023	64,61	428,5	38,37	70,48	28,23
Kabupaten Mamberamo Raya	2019	52,2	735	51,91	100,6	98,81
Kabupaten Mamberamo Raya	2020	51,78	754,7	39,8	59,06	108,19
Kabupaten Mamberamo Raya	2021	52,18	689,33	35,59	59,07	117,21
Kabupaten Mamberamo Raya	2022	53,1	669,25	40,23	128,2	70,69
Kabupaten Mamberamo Raya	2023	54,08	694,08	40,89	105,15	69,33
Kabupaten Nduga	2019	30,75	645,65	33,57	106,59	214,31
Kabupaten Nduga	2020	31,55	649,04	34,1	62,18	219,13
Kabupaten Nduga	2021	32,84	578,93	32	62,19	216,45
Kabupaten Nduga	2022	34,1	560,57	37,41	160,63	206,75
Kabupaten Nduga	2023	35,19	580,96	98,2	109,99	212,62
Kabupaten Lanny Jaya	2019	48	655,96	33,3	126,72	349,88
Kabupaten Lanny Jaya	2020	47,86	682,36	34,04	65,79	349,88
Kabupaten Lanny Jaya	2021	48,68	617,36	31,82	65,79	346,06
Kabupaten Lanny Jaya	2022	49,62	597,59	37,04	182,68	333,99
Kabupaten Lanny Jaya	2023	50,56	622,03	36,41	186,14	327,09
Kabupaten Mamberamo Tengah	2019	47,23	571,84	33,08	75,44	88,55
Kabupaten Mamberamo Tengah	2020	47,57	686,22	34,2	61,54	94,75
Kabupaten Mamberamo Tengah	2021	48,32	612,3	32,12	61,74	97,96

Kabupaten Mamberamo Tengah	2022	49,25	592,69	37,23	134,61	54,29
Kabupaten Mamberamo Tengah	2023	50,22	614,06	38,24	71,98	47,93
Kabupaten Yalimo	2019	48,08	633,29	32,92	106,34	243,26
Kabupaten Yalimo	2020	48,34	636,62	33,57	61,54	249,87
Kabupaten Yalimo	2021	49,01	580,57	31,52	51,54	246,62
Kabupaten Yalimo	2022	49,9	561,97	37,04	148,25	222,97
Kabupaten Yalimo	2023	50,87	583,25	36,46	93,1	220,41
Kabupaten Puncak	2019	42,7	825,59	36,47	119,3	205,14
Kabupaten Puncak	2020	43,04	845,57	36,06	64,31	215,63
Kabupaten Puncak	2021	43,17	760,54	33,09	64,32	219,65
Kabupaten Puncak	2022	43,87	736,24	38,07	173,02	179,8
Kabupaten Puncak	2023	44,59	762,64	98,97	228,92	190,31
Kabupaten Dogiyai	2019	55,41	517,34	34,32	109,13	113,37
Kabupaten Dogiyai	2020	54,84	523,76	34,91	61,73	116,9
Kabupaten Dogiyai	2021	55	469,38	32,7	61,73	119,39
Kabupaten Dogiyai	2022	55,72	454,61	37,85	149,53	94,11
Kabupaten Dogiyai	2023	56,7	474,62	99,54	85,59	89,23
Kabupaten Intan Jaya	2019	47,51	717,1	34,9	110,49	136,33
Kabupaten Intan Jaya	2020	47,79	724,91	35,88	61,75	143,52
Kabupaten Intan Jaya	2021	48,34	649,87	32,57	61,76	149,22
Kabupaten Intan Jaya	2022	49,25	629,5	38,4	148,53	104,17
Kabupaten Intan Jaya	2023	50,19	651,6	99,45	96,5	100,63
Kabupaten Deiyai	2019	50,11	502,35	35,38	104,23	93,08
Kabupaten Deiyai	2020	49,46	512,77	36,63	60,33	94,43
Kabupaten Deiyai	2021	49,96	461,84	34,94	60,34	96,31
Kabupaten Deiyai	2022	50,42	447,6	39,34	134,82	71,67
Kabupaten Deiyai	2023	51,18	468,09	99,32	113,45	63,77
Kota Jayapura	2019	80,16	659,7	58,64	101,02	25,8
Kota Jayapura	2020	79,94	665,18	56,52	31,86	26,55
Kota Jayapura	2021	80,11	599,69	56,71	31,87	27,94
Kota Jayapura	2022	80,61	580,48	64,82	117,68	13,15
Kota Jayapura	2023	81,14	640,4	85,17	164,37	11,1

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2024 (data diolah)

Lampiran II Statistika Deskriptif

	IPM	DAU	DBH	DANA_OT...	DANA_DESA
Mean	58.03228	670.1945	86.46083	100.0054	178.4806
Median	56.70000	655.9600	38.42000	100.4500	151.0600
Maximum	81.14000	1272.040	1982.710	265.7700	428.1700
Minimum	30.75000	408.3200	27.72000	29.01000	11.10000
Std. Dev.	11.01918	148.9560	240.4948	48.59905	101.6210
Skewness	0.040261	1.400010	5.853172	0.697985	0.760109
Kurtosis	2.403321	6.586849	38.52045	3.012788	3.016925
Jarque-Bera	2.190160	125.0963	8450.727	11.77459	13.96439
Probability	0.334513	0.000000	0.000000	0.002774	0.000928
Sum	8414.680	97178.21	12536.82	14500.79	25879.68
Sum Sq. Dev.	17484.82	3195056.	8328637.	340109.0	1487063.
Observations	145	145	145	145	145

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran III *Common Effect*

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 02/02/24 Time: 18:52

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 145

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.60539	3.900127	15.28293	0.0000
DAU	0.011090	0.005632	1.968914	0.0509
DBH	0.012029	0.003279	3.668359	0.0003
DANA_OT SUS	-0.007770	0.016568	-0.469000	0.6398
DANA_DESA	-0.051929	0.008452	-6.143737	0.0000
R-squared	0.291894	Mean dependent var		58.03228
Adjusted R-squared	0.271663	S.D. dependent var		11.01918
S.E. of regression	9.404064	Akaike info criterion		7.354035
Sum squared resid	12381.10	Schwarz criterion		7.456681
Log likelihood	-528.1675	Hannan-Quinn criter.		7.395744
F-statistic	14.42765	Durbin-Watson stat		0.054443
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran IV *Fixed Effect*

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 02/02/24 Time: 18:59

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 145

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.95996	1.214735	52.65344	0.0000
DAU	-0.008955	0.001616	-5.541275	0.0000
DBH	0.001002	0.000743	1.349982	0.1797
DANA_OT SUS	0.008331	0.001344	6.200716	0.0000
DANA_DESA	-0.004740	0.002414	-1.963867	0.0520

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997490	Mean dependent var	58.03228
Adjusted R-squared	0.996772	S.D. dependent var	11.01918
S.E. of regression	0.626024	Akaike info criterion	2.098082
Sum squared resid	43.89351	Schwarz criterion	2.775546
Log likelihood	-119.1110	Hannan-Quinn criter.	2.373359
F-statistic	1390.712	Durbin-Watson stat	1.677830
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran V *Random Effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/02/24 Time: 19:00
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 145
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.00346	2.150223	29.76596	0.0000
DAU	-0.008810	0.001603	-5.497610	0.0000
DBH	0.001111	0.000739	1.503164	0.1350
DANA_OT SUS	0.008202	0.001339	6.125458	0.0000
DANA_DESA	-0.005507	0.002393	-2.301373	0.0228
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			9.600834	0.9958
Idiosyncratic random			0.626024	0.0042
Weighted Statistics				
R-squared	0.516712	Mean dependent var		1.691540
Adjusted R-squared	0.502903	S.D. dependent var		0.914294
S.E. of regression	0.644623	Sum squared resid		58.17551
F-statistic	37.42054	Durbin-Watson stat		1.262617
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.039556	Mean dependent var		58.03228
Sum squared resid	16793.18	Durbin-Watson stat		0.004374

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran VI Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1124.285019	(28,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	818.113159	28	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 02/02/24 Time: 19:02

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 145

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.60539	3.900127	15.28293	0.0000
DAU	0.011090	0.005632	1.968914	0.0509
DBH	0.012029	0.003279	3.668359	0.0003
DANA_OT SUS	-0.007770	0.016568	-0.469000	0.6398
DANA_DESA	-0.051929	0.008452	-6.143737	0.0000
R-squared	0.291894	Mean dependent var		58.03228
Adjusted R-squared	0.271663	S.D. dependent var		11.01918
S.E. of regression	9.404064	Akaike info criterion		7.354035
Sum squared resid	12381.10	Schwarz criterion		7.456681
Log likelihood	-528.1675	Hannan-Quinn criter.		7.395744
F-statistic	14.42765	Durbin-Watson stat		0.054443
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran VII Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.442372	4	0.0143

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DAU	-0.008955	-0.008810	0.000000	0.4874
DBH	0.001002	0.001111	0.000000	0.1206
DANA_OT SUS	0.008331	0.008202	0.000000	0.2440
DANA_DESA	-0.004740	-0.005507	0.000000	0.0160

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 02/02/24 Time: 19:03

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 145

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.95996	1.214735	52.65344	0.0000
DAU	-0.008955	0.001616	-5.541275	0.0000
DBH	0.001002	0.000743	1.349982	0.1797
DANA_OT SUS	0.008331	0.001344	6.200716	0.0000
DANA_DESA	-0.004740	0.002414	-1.963867	0.0520

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997490	Mean dependent var	58.03228
Adjusted R-squared	0.996772	S.D. dependent var	11.01918
S.E. of regression	0.626024	Akaike info criterion	2.098082
Sum squared resid	43.89351	Schwarz criterion	2.775546
Log likelihood	-119.1110	Hannan-Quinn criter.	2.373359
F-statistic	1390.712	Durbin-Watson stat	1.677830
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran VIII *Cross Section Fixed Effect*

	KABUPATE N_KOTA	Effect
1	Kabupaten Merauke	17.59507
2	Kabupaten Jayawijaya	1.627840
3	Kabupaten Jayapura	14.19435
4	Kabupaten Nabire	11.41049
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	8.933457
6	Kabupaten Biak Numfor	14.04289
7	Kabupaten Paniai	-1.914793
8	Kabupaten Puncak Jaya	-7.818815
9	Kabupaten Mimika	14.75044
10	Kabupaten Boven Digoel	5.109357
11	Kabupaten Mappi	1.695845
12	Kabupaten Asmat	-4.509024
13	Kabupaten Kan. Yahukimo	-6.686400
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	-9.956953
15	Kabupaten Tolikara	-6.343340
16	Kabupaten Sarmi	6.213064
17	Kabupaten Keerom	7.501224
18	Kabupaten Waropen	6.281530
19	Kabupaten Supiori	2.903537
20	Kabupaten Mamberamo Raya	-5.302679
21	Kabupaten Nduga	-25.54313
22	Kabupaten Lanny Jaya	-8.790385
23	Kabupaten Mamberamo Tengah	-10.27782
24	Kabupaten Yalimo	-9.035225
25	Kabupaten Puncak	-13.61988
26	Kabupaten Dogiyai	-4.378506

	Kabupaten	
27	Intan Jaya	-9.548673
	Kabupaten	
28	Deiyai	-9.888980
	Kota	
29	Jayapura	21.35552

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 10